



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.13, No.2, Desember 2016

OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia
- Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah
- Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan
- Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa
- Otonomi dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah

RESUME PENELITIAN

- Masa Depan Partai Islam di Indonesia
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia

REVIEW BUKU

- Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 2	Hlm. 137-275	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Mitra Bestari

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam, serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Bahtiar Effendy (*Ahli Kajian Politik Islam*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Internasional*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Nico Harjanto, Ph.D (*Ahli Kajian Perbandingan Politik*)
Dr. Philips J. Vermonte (*Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan*)
Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (*Ahli Politik Internasional, Migrasi, ASEAN*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Politik Luar Negeri dan Perbatasan*)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Otonomi Daerah dan Desa*)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)
Athiqah Nur Alami, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian Perbatasan, ASEAN dan Hubungan Internasional*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.Sos., M.IP
Devi Darmawan, S.H
Anggih Tangkas Wibowo, MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN

1829-8001

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i–ii
Catatan Redaksi		iii–iv
Artikel		
	• Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia <i>Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Irham</i>	137–148
	• Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah <i>Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady</i>	149–166
	• Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan <i>Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu</i>	167–191
	• Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa <i>Nyimas Latifah Letty Azizi</i>	193–211
	• Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah <i>R. Siti Zuhro</i>	213–225
Resume Penelitian		
	• Masa Depan Partai Islam di Indonesia <i>Moch. Nurhasim, dkk</i>	227–244
	• Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia <i>Nostalgawan Wahyudhi, dkk</i>	245–260
Review Buku		
	• Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah <i>Yusuf Maulana</i>	261–268
Tentang Penulis		269–270
Pedoman Penulisan		271–275

CATATAN REDAKSI

Reformasi tahun 1998 membawa dampak pada pelaksanaan Otonomi di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan menjalankan pemerintahan secara otonom, diharapkan daerah mampu menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan selama Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi dan pengawasannya. Sehingga, harapan dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun justru sebaliknya, banyak daerah tidak mampu membawa daerah kepada kesejahteraan, dan bahkan terjebak pada pragmatism politik akibat efek Pilkada Langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Otonomi Daerah, Desentralisasi, pembangunan desa dan konteks sosial ekonomi yang memunculkan perempuan kepala daerah. Artikel pertama ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna tentang “Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia” mengurai tentang model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat.

Artikel kedua dengan judul Konteks Sosial Ekonomi: Kemunculan Perempuan Kepala Daerah yang ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih.

Artikel berikutnya, “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi” tulisan La Husen Zuada dkk membahas mengenai praktek oligarki di Wakatobi. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah dan pada akhirnya bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Artikel keempat yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Azis tentang “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa” menguraikan tentang persoalan alokasi pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Adapun tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul “Otodada dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah” menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otoda untuk konsisten

menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Tinjauan buku yang ditulis oleh Yusuf Maulana yang berjudul “Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah” membahas mengenai persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun.

Selain lima artikel dan satu tinjauan buku diatas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama, yang ditulis oleh Moch. Nurhasim berjudul “Masa Depan Partai Islam di Indonesia” menggambarkan peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Artikel kedua ditulis oleh Nostalgiawan Wahyudi yang berjudul “Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia” yang menguraikan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change di beberapa negara Timur Tengah tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi dan kajian mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 303:324.998

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

**RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL
PENGANGGARAN PARTISIPATIF
DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI
TIGA PROVINSI DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 137-148

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar

53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilaian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady

**KONTEKS SOSIAL EKONOMI
KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA
DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 149-166

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat

kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

Kata Kunci: sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

**DESENTRALISASI DAN OLIGARKI
PREDATOR DI WAKATOBI:
PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU
DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 167-191

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahaan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

**OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS
DANA DESA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 193-211

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: otonomi desa, efektivitas, dana desa

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

**OTODA DALAM UU PEMDA BARU:
MASALAH DAN TANTANGAN
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 213-225

Setelah 16 tahun menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, hasil tidak menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu inovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah mengalami stagnasi dalam perkembangan mereka. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Hukum 23/2014, menggantikan hukum 34/2004 tentang pemerintah daerah, adalah hukum mengikat daerah dan secara signifikan lebih menuntut kinerja. Meskipun masih dipertanyakan, hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, pelayanan publik.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 227-244

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politis di Tanah Air, namun jauh dari itu, pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islama di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan ke-Indonesiaan itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi

Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci : Partai Politik, Partai Islam, Demokrasi, Pemilu

DDC: 320.962.4

Nostalgawan Wahyudhi

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO, SUDAN, DAN SOMALIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 245-260

Riset ini diformulasikan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia paska Arab spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena "*backward bending process*" dimana gejala politik dan *regime change* di beberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena *Arab exceptionalism* terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

Kata kunci: Politik Islam, Arab spring, Demokrasi

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

**MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA
DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 261-268

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

Kata Kunci : Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

DDC: 352.14

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

***PUBLIC RESPONSES TOWARDS
PARTICIPATORY BUDGETING MODEL
IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE
STUDIES IN THREE PROVINCES IN
INDONESIA***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 137-148

Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to technical constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia; Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involved, the greater

the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.

Kata kunci: village fund, participatory budgeting, public responses

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi and Ahmad Helmy Fuady

***SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF
INDONESIAN WOMEN PATH
TO LOCAL POLITICS***

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 149-166

This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socio-economic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.

Keywords: socio-economic condition, university, internet, female local leader.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC IN RURAL DEVELOPMENT

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 167-191

The present article discuss about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entrepreneurs who takes away all the major government tourist projects. This group of politicians and enterprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.

Keywords: Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakatobi.

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

VILLAGE AUTONOMY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 193-211

The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to improve the welfare of rural communities. However, in the implementation of the use of village funds still felt not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and not the involvement of active community participation in the management of village funds.

Keywords: village autonomy, effectiveness, village fund

DDC: 352.14

R. Siti Zuhro

LOCAL GOVERNMENT ACT OTODA IN NEW: ISSUES AND CHALLENGES AND LOCAL CONNECTION

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 213-225

After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation

between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

Keywords: decentralization, local autonomy, local government, public services.

DDC: 324.23

Moch. Nurhasim

THE FUTURE OF ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 227-244

The existence of an Islamic political party is not just a marker of the flourishing plurality polities in the country, but far from it, a plurality Indonesiaan nothing without all Islama in it. Therefore iu, Islamic parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, malainkan also as part of plurality and Indonesiaan itself. The results of this study showed that the chances of Islamic ideology and Islamic parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the question Indonesiaan and nationality. Opportunities of Islamic parties on the one hand can be seen from the results electoral, but in the much more basic than it is how meningkatakn quality presence and contribution of Islamic parties for the practice of democracy in Indonesia is not only more ethical and civilized, but also more fair, accountable, and integrity.

Keywords: Party, Islamic Party, Democracy, Election

DDC: 320.962.4

Nostalgawan Wahyudhi

THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 245-260

This research is formulated to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of “backward bending process” in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reason. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study proves that the phenomenon of ‘Arab exceptionalism’ has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.

Keywords: Political Islam, Arab Spring, Democracy

DDC: 307.72

Yusuf Maulana

INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME OF REGIONAL AUTONOMY

Journal of Political Research

Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 261-268

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened.

Keywords: village, decentralization, autonomy, institutional.

**RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL PENGANGGARAN
PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI TIGA
PROVINSI DI INDONESIA**

***PUBLIC RESPONSES TOWARDS PARTICIPATORY BUDGETING
MODEL IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE STUDIES IN THREE
PROVINCES IN INDONESIA***

Kadek Dwita Apriani

Universitas Udayana
Jl P.B. Sudirman Denpasar-Bali
Email: kadek88@gmail.com

Irhamna Irham

Universitas Indonesia, Depok-Jawa Barat
Email: irhamna.irham@gmail.com

Diterima: 29 Oktober 2016; direvisi: 29 November 2016; disetujui: 28 Desember 2016

Abstract

Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to technical constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia; Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involved, the greater the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.

Keywords: *village fund, participatory budgeting, public responses*

Abstrak

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan

respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masing-masing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar 53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilaian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rebug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rebug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: *dana desa, anggaran partisipatif, respon publik*

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari desentralisasi adalah menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi sampai kepada tingkatan pemerintahan paling bawah¹. Dalam Nawa Cita, dikemukakan sembilan agenda pembangunan prioritas, salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan². Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kebijakan desentralisasi, memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa dalam merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan.

UU Desa mengamanatkan negara harus menyediakan 10% dari total APBN untuk dialokasikan sebagai dana desa, dan kemudian juga ditambahkan alokasi dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus (DAK)³. Penyediaan ruang fiskal yang cukup besar ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Jumlah dana desa yang dialokasikan pada APBN TA 2015 adalah Rp.20,7 triliun, dan naik menjadi Rp.46,9 triliun

dalam APBN TA 2016⁴. Jumlah tersebut bahkan melebihi jumlah anggaran belanja beberapa K/L seperti: Kementerian Pertanian (Rp.31,5 triliun), Kementerian Keuangan (Rp.39,3 triliun), dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Rp.40,6 triliun)⁵. Dengan alokasi tersebut, pada APBN TA 2015 jika dibagi sebanyak 72.465 desa, rata-rata desa akan menerima Rp.200-300 juta rupiah, sementara pada APBN TA 2016 dengan peningkatan alokasi anggaran, dan meningkatnya jumlah desa menjadi 74.754 desa, masing-masing desa rata-rata mendapatkan besaran Rp.500-800 juta.

Azas pelaksanaan UU Desa antara lain adalah pemberdayaan dan partisipasi. Dengan demikian, UU Desa membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi aktif masyarakat dan secara kontinu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa sehingga pembangunan desa dapat berjalan. Azas ini juga menjadi dasar untuk menjamin kepentingan seluruh masyarakat dapat diakomodasi. Partisipasi juga dapat menjadi sebuah mekanisme kontrol yang efektif. Kontrol terhadap pemerintahan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kekuasaan untuk mengarahkan, dan untuk menghasilkan sebuah pengawasan yang baik, masyarakat harus terlibat dalam

¹ Marco Bunte, "Indonesia's Protracted Decentralization: Contested Reforms and Their Unintended Consequences" dalam Marco Bunte dan Andreas Ufen (ed), *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (New York: Routledge, 2009) hlm. 114.

² Kementerian PPN/Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku 1* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015) hlm. 79.

³ Lihat Pasal 72 dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016.

⁵ Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas* (Jakarta: 2016), hlm.20.

prosesnya, mereka harus tahu apa yang terjadi dibalik sebuah kebijakan⁶.

Salah satu model partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang kerap dirujuk sebagai contoh adalah *participatory budgeting*⁷ di Porto Alegre, Brazil. Menurut Souza (2001) proses redemokratisasi yang terjadi di Amerika Latin pada dekade 1980 menciptakan peluang partisipasi bagi masyarakat, hal tersebut kemudian didukung oleh desentralisasi kekuasaan, sehingga pemerintah daerah/lokal memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengalokasikan anggaran serta kebijakan apa yang harus mereka bentuk. Menggunakan konsep tangga partisipasi dari Arnstein (1971), model yang berkembang di Porto Alegre sudah mencapai tahapan *citizen control*. Proses penganggaran dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan, komite, komite khusus hingga delegasi tingkat kota yang kemudian memutuskan alokasi anggaran. Partisipasi ini pun berjalan secara inklusif, seluruh warga terlibat tanpa adanya diskriminasi, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah. Dalam penyusunan anggaran, masyarakatlah yang menentukan alokasi sumber daya, sektor mana yang akan mereka bangun, dan seterusnya. Bank Dunia pada tahun 2001 memilih model ini sebagai salah satu proyek percontohan untuk melihat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pembangunan yang inklusif. Ide dasar dari penyusunan anggaran yang partisipatif adalah mendorong terbentuknya pendalaman demokrasi (*deepening democracy*). Selain itu, pelibatan masyarakat secara penuh dalam proses penyusunan anggaran dapat memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi, karena proses yang akuntabel dan transparan.

Kondisi objektif di Indonesia sampai saat ini memperlihatkan pemerintah desa masih disibukkan dengan masalah birokrasi yang rumit, alur pertanggungjawaban yang panjang terkait Dana Desa, sehingga membuat mereka terkadang tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada

⁶ Danny Burns, Robin Hambleton, dan Paul Hoggert, *The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy* (London: Macmillan, 1994), hlm. 153-156

⁷ Celina Souza, "Participatory Budgeting in Brazilian Cities: Limits and Possibilities in Building Democratic Institutions" dalam *Environment & Urbanization* Vol 13 No. 1, April 2001

saat yang bersamaan, mereka juga dituntut untuk menyelesaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya untuk bisa mencairkan Dana Desa pada tahun anggaran berjalan. Pada titik inilah, terlihat bahwa dimensi partisipasi masyarakat desa belum mendapat perhatian yang memadai, karena perdebatan yang terjadi masih pada tataran administratif.

Dengan berbagai persoalan yang disebutkan di atas, Dana Desa dikhawatirkan hanya menjadi wacana yang terhenti di tingkatan elit desa. Pengetahuan warga tentang dana desa pun luput dari kajian pihak terkait. Jika pengetahuan warga tentang dana desa rendah, maka kita tak dapat berharap banyak pada partisipasi warga dalam merencanakan dan mengawasi pemanfaatan dana desa. Oleh karenanya, penelitian mengenai respon publik terhadap program Dana Desa menjadi sangat penting.

Penelitian ini ingin memberi gambaran mengenai respon publik di Indonesia terhadap program Dana Desa yang telah dijalankan selama kurang lebih 2 tahun di sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia. Karenanya, dalam penelitian ini dipilih tiga provinsi yang mewakili wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur untuk memperlihatkan perbedaan respon publik di tiga wilayah Indonesia mengenai Dana Desa.

Kerangka Konsep

Participatory Budgeting merupakan sebuah program pembuatan kebijakan yang menekankan pada partisipasi warga secara menyeluruh, melalui tingkatan-tingkatan wilayah (spasial) dan tematik untuk mengatur mengenai alokasi sumber daya berdasarkan prioritas kebijakan, serta memantau pengeluaran publik.⁸ Program ini mengutamakan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan prioritas untuk mengatur kebutuhan publik.⁹

Istilah *Participatory Budgeting* pertama kali populer dari sebuah program peningkatan kualitas hidup di kota Porto Alegre, Brazil. Program ini dicetuskan oleh *Partido dos*

⁸ Brian Wampler, "A Guide to Participatory Budgeting", <http://www.internationalbudget.org/resources/library/GPB.pdf>, (diakses pada 18 November 2016), pukul 21.34 WIB

⁹ *Ibid.*

Trabaldores (PT) pada tahun 1988, sebagai hasil adaptasi nilai-nilai sosialis dalam realitas lokal melalui aliansi-aliansi.¹⁰ Keberhasilan program ini dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Porto Alegre disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (1) kebudayaan komunitas-komunitas yang ada untuk menyuarakan aspirasi, keinginan, maupun tuntutan secara bersama; dan (2) gelombang migrasi besar-besaran yang mengakibatkan terbentuknya kesadaran bersama dalam menangani tantangan dan permasalahan yang dihadapi akibat fenomena tersebut.¹¹ Narasi-narasi mengenai partisipasi dalam proses penganggaran telah menjadi sebuah nilai baru dalam perluasan demokrasi dan menjadi kritik terhadap bentuk-bentuk hirarki yang telah ada, termasuk kritik terhadap demokrasi perwakilan yang pada akhirnya hanya menjadi perebutan kekuasaan partai politik¹²

Penganggaran partisipatif di Porto Alegre dipandang sebagai sebuah model penerapan demokrasi deliberatif. Pengalaman dari proses tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan sebelumnya mengenai hubungan antara pengetahuan dan partisipasi. Sebelumnya partisipasi publik dinilai sebagai hasil dari pengetahuan warga yang mumpuni. Dengan kata lain, kualitas partisipasi berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Pengalaman Porto Alegre justru membuktikan sebaliknya, dimana partisipasi warga dari berbagai lapisan masyarakat dalam program *Participatory Budgeting* di kota ini meningkatkan pengetahuan politik, khususnya mengenai anggaran publik dan demokrasi.¹³ Gret dan Sintomer (2005) menyebutnya sebagai sekolah demokrasi bagi warga.

Demokrasi yang dirujuk dalam hal ini adalah demokrasi komunitarian (demokrasi deliberatif). Demokrasi model ini menekankan

¹⁰ Iain Bruce, *The Porto Alegre Alternative: Direct Democracy in Action*, (London: Pluto Press, 2004), hlm. 38-39

¹¹ *Ibid*, hlm. 39-40.

¹² Anja Roche, *Framing Citizen Participation: Participatory Budgeting in France, Germany, and the United Kingdom* (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 31

¹³ Marion Gret dan Yves Sintomer, *The Porto Alegre Experiment: Learning Lessons for Better Democracy*, (London: Zed Books, 2005), hlm. 132

unit analisa pada masyarakat lokal dan nilai kebersamaan secara kolektif. Pada bentuk umumnya diwujudkan dalam forum warga dengan musyawarah.¹⁴ Nilai utama yang diusung demokrasi deliberatif adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan musyawarah, dan dialog antara berbagai pihak warga dengan tujuan mencapai konsensus, atau musyawarah mufakat.¹⁵

Demokrasi deliberatif tidak membuka ruang yang lebar bagi kompetisi politik, melainkan menekankan pada nilai toleransi, saling menghormati, upaya argumentasi, dan lainnya. Kelebihan demokrasi deliberatif terletak pada terbukanya peluang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat menghindari munculnya dominasi kelompok elit, serta tarik menarik kekuasaan.¹⁶ Demokrasi deliberatif berupaya meningkatkan komunikasi publik sebagai bentuk pembangunan kesadaran warga dalam berpolitik dan proses penyusunan kebijakan. Alat dari demokrasi deliberatif adalah forum, dialog, dan perkumpulan yang mengutamakan musyawarah.

Studi dari Sherry Arnstein¹⁷ (1969) menjadi salah satu studi klasik dari partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan mengenai tipologi partisipasi yang kemudian dikenal dengan istilah “tangga partisipasi masyarakat” atau “*The Ladder of Citizen Participation*”. Konsep ini menjelaskan bagaimana sumber daya mengalami redistribusi yang kemudian memungkinkan kelompok yang selama ini tidak memiliki kekuasaan atas sumber daya (*the have-not citizens*) untuk dapat ikut menentukan bagaimana sebuah kebijakan dibentuk, diimplementasikan, dan diawasi¹⁸. Dalam studinya, Arnstein (1969) membagi partisipasi masyarakat dalam delapan

¹⁴ Sutoro Eko, “Komunitarianisme Demokrasi Lokal”, <http://www.ireyogya.org/ire.php?about=komunitarian.htm>, (diakses pada 19 November 2016), pukul 09.38 WIB, hlm. 2

¹⁵ Dan Satriana dan Rianingsih Djohani, *Memfasilitasi Konsultasi Publik*. (Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2007), hlm. 4

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid.*, hml. 158

¹⁸ Lebih lanjut dalam Sherry R. Arnstein “A Ladder of Citizen Participation” *Journal of the American Institute of Planners* (JAIP) Vo.35 No.4 Juli, 1969, hlm. 216-224.

tingkatan: *Manipulation; Therapy*, dua tingkatan pertama ini dikelompokkan kembali dalam derajat non-partisipasi; *Information; Consultation; Placation*, tiga tingkatan ini disebut dengan *degrees of tokenism; Partnership; Delegated Power*; dan *Citizen Control*, tiga tingkatan terakhir merupakan derajat tertinggi yang disebut dengan *citizen power*.

Partisipasi warga dalam program *Participatory Budgeting* di Porto Alegre dinilai sudah mencapai tangga partisipasi tertinggi, yakni *Citizen Control*. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan program sejenis yang ada di Indonesia? Program tersebut adalah Dana Desa. Program Dana Desa ini yang akan dibedah dengan konsep Anggaran Partisipatif; Demokrasi Deliberaif; dan Tangga Partisipasi Masyarakat dalam bagian pembahasan.

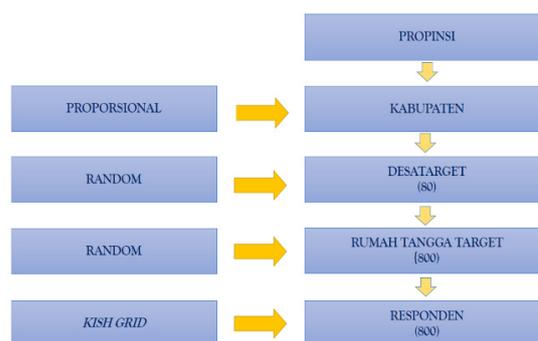
Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berjenis deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang respon publik di Indonesia terhadap model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa, bukan mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Pengumpulan data utama dilakukan dengan wawancara terstruktur terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Jumlah total responden dalam penelitian ini sebanyak 2.400 orang yang terbagi ke tiga provinsi, sehingga jumlah sampel per provinsi adalah 800. Tingkat kepercayaan dalam riset ini adalah 95% dan *Margin of Error (MoE)* 3% di masing-masing provinsi.¹⁹ Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *multistage random sampling*, dengan memperhatikan proporsi penduduk di masing-masing kabupaten yang ada di ketiga provinsi yang menjadi lokus penelitian. Pengambilan data lapangan di Banten; Gorontalo; dan Papua Barat tidak dilaksanakan secara bersamaan. Adapun jadwal penelitian di tiga provinsi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Waktu Pengumpulan Data

No	Provinsi	Waktu Pengumpulan Data
1	Gorontalo	2 – 21 Juni 2016
2	Papua Barat	23 Juni – 15 Juli 2016
3	Banten	1-20 Agustus 2016

Dipilihnya tiga provinsi tersebut dan waktu penelitian yang tidak bersamaan berdasarkan alasan metodologis, dimana masing-masing provinsi mewakili wilayah Indonesia. Banten dipandang sebagai potret Indonesia bagian Barat; Gorontalo mewakili wilayah Indonesia Tengah; dan Papua Barat merupakan representasi wilayah Indonesia Timur. Di masing-masing provinsi diambil 800 sampel dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk per kabupaten/kota. Selanjutnya jumlah sampel di tiap kabupaten berbeda sesuai dengan jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Di masing-masing kabupaten diambil beberapa desa secara acak sesuai proporsi kabupaten. Di masing-masing desa diambil 5 RT/kampung dengan acak sederhana. Kemudian di masing-masing RT/kampung diambil 2 KK dengan acak sederhana, lalu di tiap KK diambil 1 responden dengan sistem *Kish Grid*. Proporsi gender dalam penelitian ini juga dijaga agar 50:50 dengan mekanisme nomor kuesioner ganjil untuk laki-laki dan genap untuk responden perempuan. Tahapan-tahapan dalam *Multistage Random Sampling* yang dilakukan terhadap populasi penduduk di masing-masing provinsi digambarkan dalam skema di bawah ini:

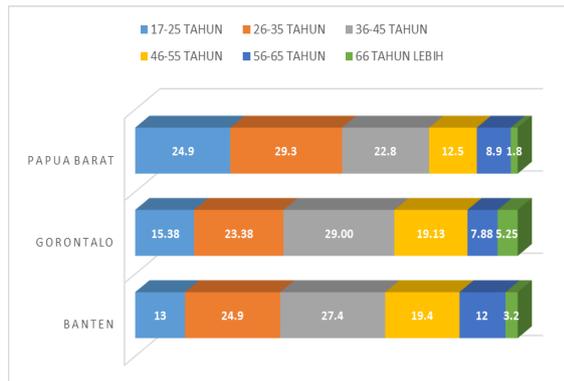


Gambar 1. Tahapan Pengambilan Sampel

¹⁹ David de Vaus, *Research Design in Social Research* (London: SAGE Publication, 2006), hlm. 81

Demografi Responden

Sebelum memaparkan data mengenai respon publik di Indonesia terhadap model penganggaran partisipatif, penting untuk menjelaskan karakteristik responden dalam penelitian ini, seperti kategori desa/kota; usia; penghasilan; dan tingkat pendidikan. Terdapat variasi karakteristik responden dari tiga provinsi yang merupakan lokus pada penelitian ini. Berikut adalah data demografik responden di tiga provinsi.



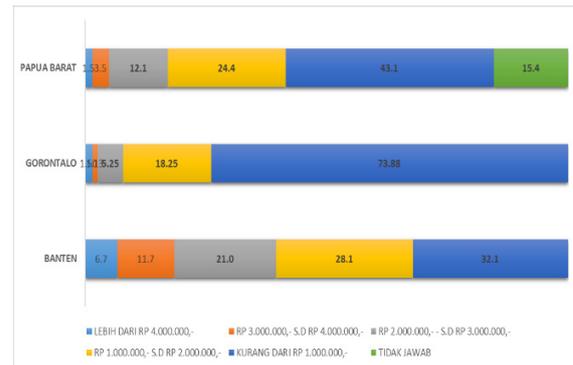
Gambar 2: Komposisi Usia Responden di Masing-Masing Provinsi

*Catatan: angka dalam persen

Tabel 2: Komposisi Tingkat Pendidikan Responden di Masing-Masing Provinsi

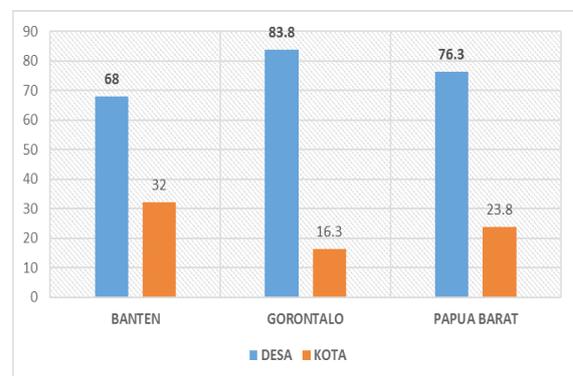
PENDIDIKAN	BANTEN	GORONTALO	PAPUA BARAT
TIDAK SEKOLAH	2.4	9.63	8.4
TIDAK TAMAT SD	5.3	1.13	4.5
TAMAT SD/SEDERAJAT	35.9	47.63	22.6
TAMAT SLTP/SEDERAJAT	19.3	17.13	22.6
TAMAT SLTA/SEDERAJAT	26.8	17.25	25
TAMAT SMK	4.2	2.63	7.9
AKADEMI (DI/DIII)	1.7	0.75	3.8
SARJANA (SI)	4.4	3.88	5.3

*Catatan: angka dalam persen



Gambar 3: Komposisi Penghasilan Per Bulan Responden di Masing-Masing Provinsi

*Catatan: angka dalam persen



Gambar 4: Komposisi Desa-Kota di Masing-Masing Provinsi

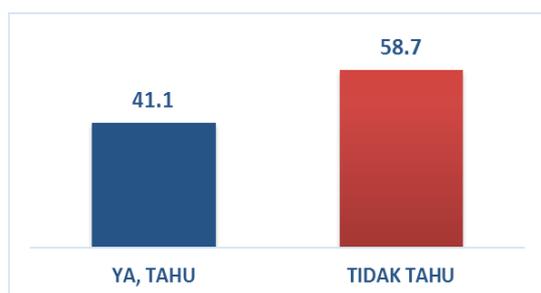
*Catatan: angka dalam persen

Berdasarkan data demografi responden yang ditampilkan di atas, diketahui bahwa responden dalam penelitian yang tersebar di tiga wilayah Indonesia ini sangat beragam. Di antara tiga provinsi baru (hasil pemekaran) yang menjadi lokus penelitian ini, Gorontalo merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah berciri pedesaan paling banyak. Lebih dari 80% responden di Gorontalo tinggal di desa. Sementara Banten merupakan wilayah dengan penduduk yang tinggal di perkotaan paling banyak jika dibandingkan persentasenya dengan dua provinsi lainnya. Persentase penduduk dengan penghasilan tinggi juga paling banyak ditemukan di Provinsi Banten.

Respon Publik terhadap Program

Dana Desa

Data berikut adalah data agregat dari tiga provinsi yang menjadi lokus penelitian (Papua Barat, Gorontalo dan Banten). Dua hal yang dilihat untuk mengukur respon publik adalah pengetahuan mengenai Dana Desa dan penilaian tentang ketepatan penggunaan dana desa (dari mereka yang tahu tentang Dana Desa. Data tersebut disajikan dalam dua gambar di bawah ini.



Gambar 5: Pengetahuan Masyarakat Tentang Program Dana Desa

*Catatan: angka dalam persen

Data di atas memperlihatkan bahwa program Dana Desa yang telah bergulir selama dua tahun ini belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Lebih dari 50% masyarakat di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur tidak mengetahui mengenai program tersebut. Hal ini mengindikasikan respon publik terhadap program tersebut belum optimal. Pengetahuan masyarakat mengenai Dana Desa dipandang memiliki kaitan erat dengan partisipasi publik dalam program tersebut. Informasi atau pengetahuan tentang sebuah program dalam teori tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan Arnstein (1969) menempati posisi penting, namun tidak secara otomatis dapat memberikan ruang dan akses terhadap keputusan yang akan diambil. Masyarakat yang memiliki informasi atau pengetahuan masih berada dalam derajat tokenisme, belum sampai pada tahapan partisipatif.

Informasi terkait dana desa menjadi salah satu bahan evaluasi, ketika dalam penelitian ini ditemukan sebesar 58,7% masyarakat di

tiga provinsi (secara agregat) belum memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai mengenai dana desa, berarti ada pola sosialisasi yang harus dievaluasi. Kementerian teknis yang berkaitan langsung dengan dana desa seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, harus menemukan strategi sosialisasi yang lebih efektif. Sehingga, masyarakat desa memiliki akses informasi dan pengetahuan yang memadai. Tanpa adanya informasi yang memadai, agaknya sulit bagi masyarakat desa untuk meningkatkan peran mereka dan mencapai tangga partisipasi masyarakat tertinggi atau tahapan *citizen control* seperti di Porto Alegre.

Temuan berikutnya, dari yang mengaku tahu atau pernah mendengar mengenai program Dana Desa (41,1%) tersebut ditanyakan pertanyaan lanjutan tentang penilaian mereka mengenai pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggal mereka. Jumlah responden yang menyatakan kurang tepat dan tidak tepat dari mereka yang mengaku tahu, sebanyak 42.2%. Sementara yang menyatakan bahwa program tersebut sangat tepat dan tepat sasaran sekitar 53%. Data mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



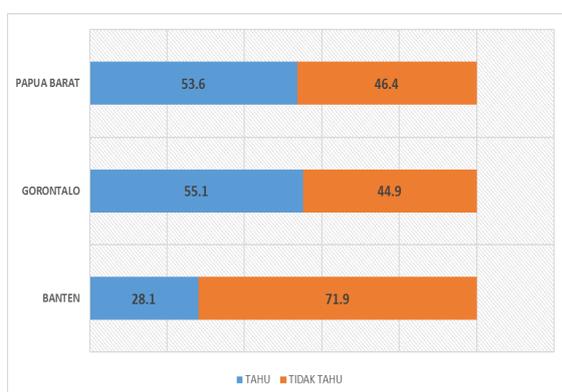
Gambar 6: Penilaian Masyarakat (yang mengaku tahu tentang dana desa) mengenai Ketepatan Pemanfaatan Dana Desa

*Angka dalam persen

Dari dua data frekuensi agregat di atas, diketahui bahwa respon publik Indonesia tentang Dana Desa belum optimal. Kemudian dilihat peta dari respon publik tersebut dan ingin diketahui

faktor apa yang mungkin berkaitan dengan respon terhadap program Dana Desa tersebut. Faktor-faktor demografi yang dikemukakan di bagian terdahulu seharusnya berkaitan dengan respon masyarakat mengenai isu-isu pembangunan. Status Sosial Ekonomi (SSE) masyarakat Indonesia umumnya dikaitkan dengan faktor wilayah. Sering kali diasumsikan, makin ke Barat maka SSE masyarakat semakin baik, sehingga akses informasinya juga semakin baik. Atas dasar itu, asumsi awal bahwa pengetahuan dan respon masyarakat tentang pembangunan semakin ke Barat akan semakin baik, dan sebaliknya.

Hanya saja, berdasarkan pemetaan data yang diperoleh dari hasil survei tiga provinsi mengenai dana desa, asumsi di atas tidak terbukti. Temuan lapangan dalam survei ini justru memperlihatkan bahwa informasi mengenai pembangunan, khususnya program Dana Desa paling banyak diketahui di wilayah Tengah Indonesia. Dari tiga provinsi yang disurvei, pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa paling rendah di Banten (Indonesia Barat).



Gambar 7: Pengetahuan Masyarakat Tentang Program Dana Desa per Provinsi

*Catatan: angka dalam persen

Data di atas memperlihatkan bahwa 53.6% masyarakat Papua Barat mengetahui adanya program Dana Desa. Di Gorontalo, sebanyak 55.1% masyarakat mengetahui tentang Dana Desa, sedangkan di Banten angka responden yang mengaku mengetahui tentang program tersebut hanya sebanyak 28.1%. Respon publik terhadap program Dana Desa ternyata tidak sepenuhnya bergantung pada SSE dan akses media. Di provinsi yang memiliki penduduk

perkotaan lebih banyak, masyarakatnya cenderung lebih sedikit yang mengetahui tentang Dana Desa. Bila diasumsikan bahwa program Dana Desa yang berjalan 2 tahun ini telah diketahui oleh publik melalui berbagai media, maka seharusnya makin ke Barat, pengetahuan masyarakat semakin baik, namun temuan lapangan mencerminkan hal sebaliknya. Program Dana Desa paling sedikit diketahui di Indonesia bagian Barat yang memiliki infrastruktur; akses informasi; dan penduduk perkotaan dalam persentase yang tinggi.

Karena temuan di atas, maka perlu didalami mengenai kemungkinan faktor lain yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat mengenai model penganggaran partisipatif ini. Data lapangan berikutnya memperlihatkan adanya kaitan pengetahuan responden mengenai Dana Desa dengan intensitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berbasis spasial, seperti keikutsertaan dalam rapat-rapat desa/kampung/RT. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel hasil tabulasi silang antara variabel intensitas mengikuti rapat RT/kampung/desa dengan variabel pengetahuan program Dana Desa dibawah ini.

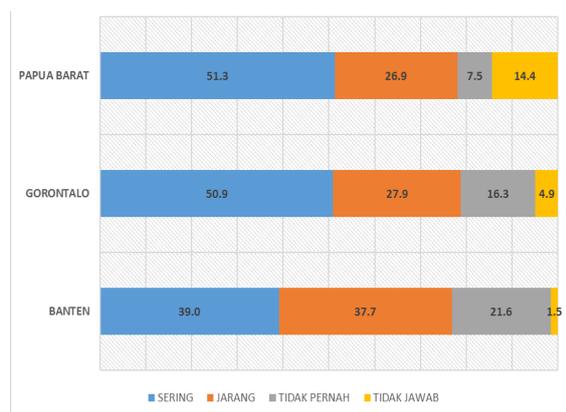
Tabel 3: Tabulasi silang antara variabel intensitas mengikuti rapat RT/kampung/desa dengan variabel pengetahuan program Dana Desa di 3 Provinsi

Intensitas mengikuti rapat Desa/Kampung/RT	Pengetahuan tentang Dana Desa	
	Tahu	Tidak tahu
Sering	50.1 %	49.8 %
Jarang	36.6 %	63.2 %
Tidak pernah	30.1 %	69.3 %
Tidak menjawab	32.4 %	67.6 %

Tabel di atas memperlihatkan bahwa intensitas partisipasi dalam pengambilan keputusan berbasis spasial berhubungan dengan pengetahuan responden mengenai Dana Desa. Semakin tinggi intensitas partisipasi maka makin besar kecenderungan warga untuk mengetahui mengenai program Dana Desa. Hal ini dapat dianalisis dengan salah satu kesimpulan dari pengalaman *Participatory Budgeting* yang telah berjalan lebih dari 2 dekade di Porto Alegre, bahwa sangat sulit dan lama jika mengharapkan partisipasi yang dihasilkan dari kecukupan pengetahuan warga mengenai

program anggaran partisipatif. Pengalaman Porto Alegre memperlihatkan bahwa partisipasi dalam forum-forum warga yang menyebabkan peningkatan pengetahuan warga mengenai program *Participatory Budgeting* itu. Hal yang sama terjadi di Indonesia pada program Dana Desa yang merupakan wujud dari model penganggaran partisipatif. Pengetahuan warga mengenai program ini didapat melalui partisipasi mereka dalam forum-forum warga berbasis spasial. Dengan begitu didapat penjelasan mengapa respon publik tentang Dana Desa lebih baik di Gorontalo dan Papua Barat dibandingkan provinsi Banten. Ternyata basis pengetahuan tentang Dana Desa bukanlah akses informasi melalui media-media, melainkan pengetahuan tersebut berpangkal pada partisipasi. Di wilayah yang persentase masyarakatnya lebih banyak tinggal di wilayah pedesaan ditemukan kecenderungan lebih sering menghadiri forum atau musyawarah warga. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan waktu dan budaya hidup bersama yang masih terpelihara. Kehadiran atau partisipasi dalam forum tersebut menyebabkan mereka terlibat dalam pembahasan mengenai Dana Desa. Dari sana pengetahuan mengenai Dana Desa tersebut diperoleh.

Data mengenai intensitas partisipasi warga dalam forum berbasis spasial di tiga wilayah penelitian diperlihatkan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 8: Intensitas Keikutsertaan dalam Pertemuan/Musyawah Desa/Kampung/RT di masing-masing Provinsi

*Catatan: angka dalam persen

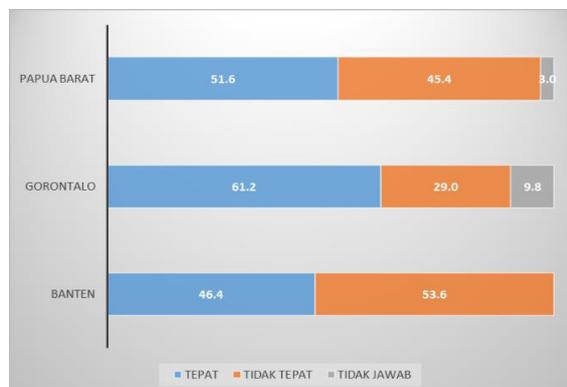
Diagram batang di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia Timur dan Tengah cenderung lebih meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan berbasis spasial. Kepedulian masyarakat di Indonesia Bagian Barat, dalam hal ini Banten, pada masalah-masalah di lingkungannya lebih rendah dibandingkan dua provinsi lain yang menjadi lokus dalam penelitian ini. Indikasi ini dilihat dari semakin ke Barat, jumlah responden yang menyatakan tidak pernah mengikuti musyawarah atau proses pengambilan keputusan di wilayah tempat tinggalnya semakin besar.

Dalam Tangga Partisipasi Masyarakat yang dikemukakan Arnstein, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa atau rapat desa, merupakan indikator dari proses yang disebut *consultation*. *Consultation* menurut Arnstein merupakan tingkatan partisipasi yang berada satu derajat di atas informasi, namun masih belum menggambarkan secara penuh kontrol masyarakat dalam proses perumusan sebuah kebijakan. Dalam tingkatan konsultasi ini masyarakat desa memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui sejumlah rapat desa atau musyawarah desa. Dalam tahapan ini juga proses penganggaran partisipatif dapat dimulai. UU 6/2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah desa melalui dana desa, mengikuti pola yang terjadi di Brazil pada akhir dekade 1980, ketika Konstitusi Brazil 1988 secara signifikan memberikan perluasan kewenangan kepada pemerintah kota, dalam hal alokasi sumber daya. Pemerintah Kota/Kabupaten (*Municipal Government*) berwenang untuk menyediakan fasilitas kesehatan publik, pendidikan dasar, dan infrastruktur.²⁰

Dalam UU Desa tahapan konsultasi ini dapat terlihat dalam proses musyawarah desa, dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Masyarakat dapat secara aktif memberikan aspirasi mereka untuk rencana kebijakan yang akan diambil, serta usulan-usulan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

²⁰ Lebih lanjut dalam Brian Wampler, *Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation, and Accountability* (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2007), hlm. 46.

Dari pengetahuan mengenai program Dana Desa, indikator berikutnya adalah penilaian mengenai ketepatan penggunaan dana desa di desa tempat tinggalnya. Temuan survei memperlihatkan data sebagai berikut.



Gambar 9: Penilaian Ketepatan Penggunaan Dana Desa di Desa Responden (Dari yang Tahu Program Dana Desa)

*Catatan: angka dalam persen

Penggunaan Dana Desa paling banyak dinilai sudah tepat sasaran di provinsi Gorontalo. Di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh Banten, responden cenderung menganggap penggunaan Dana Desa di desa tempat tinggalnya tidak/belum tepat. Ditemukan kecenderungan yang juga memperlihatkan pentingnya faktor intensitas mengikuti rapat/musyawarah pengambilan keputusan berbasis spasial dalam mempengaruhi penilaian masyarakat tentang ketepatan pemanfaatan Dana Desa. Data mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam hasil tabulasi silang di bawah ini.

Tabel 4: Tabulasi Silang Antara Intensitas Partisipasi dan Penilaian Ketepatan Pemanfaatan Dana Desa

Intensitas mengikuti rapat Desa/Kampung/RT	Ketepatan Penggunaan Dana Desa				
	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat	Tidak menjawab
Sering	11.9 %	49.1 %	30.6 %	5.3 %	3.1 %
Jarang	7.8 %	40.6 %	40.6 %	5.9 %	5.0 %
Tidak pernah	8.3 %	27.5 %	44.2 %	14.2 %	5.8 %
Tidak menjawab	13.9 %	31.9 %	36.1 %	8.3 %	9.7 %

Data di atas menunjukkan bahwa semakin rendah intensitas seseorang mengikuti pertemuan warga di wilayah tempat tinggalnya, maka

semakin besar kecenderungan untuk menilai bahwa pemanfaatan dana desa tidak tepat.

Berdasarkan beberapa temuan di atas, maka diketahui bahwa program Dana Desa yang telah berjalan selama dua tahun terakhir ternyata belum menuai respon publik yang optimal. Lebih dari setengah masyarakat mengaku masih belum mengetahui mengenai program dengan anggaran yang cukup besar ini. Dari mereka yang menyatakan mengetahui tentang dana desa, hampir setengahnya menyatakan pemanfaatan dana tersebut di lingkungan tempat tinggalnya belum tepat sasaran. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa proses penanggaran partisipatif dalam program dana desa belum optimal.

Respon publik yang dalam penelitian ini diukur melalui dua indikator yaitu pengetahuan masyarakat mengenai dana desa dan penilaian ketepatan penggunaan dana desa di lingkungan tempat tinggal mereka bukan ditentukan oleh infrastruktur dan akses informasi yang baik, melainkan berkaitan dengan intensitas keterlibatan mereka dalam proses-proses pengambilan keputusan berbasis wilayah tempat tinggal. Makin sering seseorang berpartisipasi dalam musyawarah-musyawarah di tingkat kampung/RT, makin besar tendensi yang bersangkutan untuk memiliki pengetahuan tentang dana desa dan memberikan penilaian positif atas pemanfaatan dana desa tersebut. Dengan kata lain, budaya komunitas dalam masyarakat sangat mempengaruhi respon masyarakat terhadap program pembangunan desa ini.

Pada bagian kerangka konsep telah disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Participatory Budgeting* di Porto Alegre, Brazil adalah adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama, dan budaya komunitas yang menyuarakan aspirasi secara bersama-sama. Di Indonesia, faktor budaya komunitas pada masyarakat juga sangat mempengaruhi respon publik pada program dana desa yang sebenarnya menekankan semangat partisipasi dan pemberdayaan seperti halnya *Participatory Budgeting* di Brazil. Pengetahuan dan penilaian positif masyarakat tentang program pemerintah pusat bernama Dana Desa ini ternyata tidak bergantung pada kecepatan akses informasi

dan terpaan media, melainkan pada intensitas warga yang bersangkutan dalam mengikuti rebug warga yang mengindikasikan tingkat kepedulian dan kemauan satu entitas untuk menyelesaikan masalah bersama.

Fenomena di atas dapat dijelaskan dengan kerangka konsep tentang partisipasi publik dan pengetahuan yang telah dipaparkan di bagian terdahulu. Dalam model penganggaran partisipatif ditemukan sebuah kecenderungan bahwa pengetahuan tidak menjamin partisipasi, namun partisipasi dapat menstimulasi peningkatan pengetahuan tentang program secara signifikan. Itulah yang menjadi penjelasan bagi temuan penelitian yang menyebutkan adanya kecenderungan hubungan antara intensitas mengikuti temu warga dengan pengetahuan tentang Dana Desa. Makin sering responden mengikuti temu warga berbasis spasial (rapat RT/kampung), maka makin tinggi kecenderungan responden mengetahui tentang Dana Desa. Merujuk pada temuan penelitian dari pengalaman *Participatory Budgeting* di Porto Alegre bahwa partisipasi meningkatkan pengetahuan, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut juga terjadi di Indonesia.

Lebih jauh, hal ini dapat menjadi penjelasan bagi fenomena pengetahuan dana desa berbasis wilayah (Indonesia Barat, Tengah, dan Timur), dimana makin ke barat maka pengetahuan tentang dana desa yang merupakan wujud dari model penganggaran partisipatif di Indonesia semakin rendah, padahal umumnya pengetahuan warga di Indonesia tentang sesuatu akan semakin baik dari Timur ke Barat, karena berkaitan dengan akses informasi dan infrastruktur yang cenderung lebih baik di Indonesia bagian Barat. Hal ini tidak berlaku bagi model penganggaran partisipatif yang diwujudkan dalam Dana Desa. Pengetahuan tentang Dana Desa yang lebih baik di bagian Timur Indonesia bukan dipengaruhi oleh infrastruktur dan akses informasi, melainkan dengan budaya partisipasi masyarakatnya dalam forum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama pada lingkup kecil.

Rendahnya respon publik terutama mengenai pengetahuan masyarakat juga mengindikasikan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan kementerian teknis terkait belum menemui

sasaran. Pola sosialisasi yang dilakukan tidak akan efektif jika hanya menggunakan media massa, karena terkait dengan komposisi desa-kota dan kecenderungan terbatasnya akses informasi pada masyarakat yang bercirikan desa. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai penganggaran partisipatif sebaiknya dilakukan dengan mendorong keterlibatan warga secara langsung dalam proses penganggaran.

Pelibatan masyarakat secara menyeluruh dan inklusif dapat menjadi faktor yang mempercepat proses penganggaran partisipatif. Masyarakat Indonesia melalui penelitian tentang respon terhadap model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa ini diketahui masih berada dalam tingkatan non partisipasi, tokenisme dan konsultasi pada konsep Tangga Partisipasi Masyarakat Arnstein. Partisipasi masyarakat kita belum sampai pada *Citizen Control* yang merupakan derajat tertinggi dari Tingkatan Partisipasi Masyarakat seperti yang terlihat di Porto Alegre melalui program *Participatory Budgeting*.

Sebenarnya UU Desa telah membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dari tiga tingkatan terbawah dalam Tangga Partisipasi menuju tingkatan *delegated power* dan *citizen control*. Semakin besarnya anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa di Indonesia, semakin menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Semangat dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif sangat bergantung kepada model demokrasi deliberatif yang terjadi dalam masyarakat desa. Pemilihan program unggulan desa atau prioritas pembangunan desa harus menjadi usulan bersama yang kemudian dapat diimplementasikan dengan menggunakan dana desa. Ketidaktahuan publik tentang dana desa dapat menjadi potensi penyalahgunaan dana desa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena merasa tidak diawasi dan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat desa tersebut. Proses deliberatif dalam pengambilan keputusan melalui rapat-rapat desa menjadi kunci dalam pelibatan masyarakat yang lebih luas.

Penutup

Partisipasi masyarakat Indonesia dalam proses penganggaran partisipatif yang dilihat melalui program Dana Desa di tiga provinsi ini menunjukkan derajat partisipasi yang masih rendah baik, yakni pada tingkatan non partisipasi, tokenisme, dan konsultasi. Padahal model penganggaran partisipatif membutuhkan tingkatan partisipasi yang lebih tinggi, yakni pada tataran *delegated power* dan *citizen control*. Kebutuhan tersebut semakin mendesak karena besaran dana desa semakin meningkat tiap tahunnya dan membutuhkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Publik terlihat tidak terlalu antusias dengan program yang menelan anggaran besar ini, terbukti dari respon mereka yang diukur melalui pengetahuan dan sikap terhadap program ini yang cenderung rendah. Peningkatan pengetahuan tentang Dana Desa memang sangat diperlukan, namun proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang dan program ini telah berjalan. Peningkatan pengetahuan tersebut sama pentingnya dengan peningkatan derajat partisipasi dari tokenisme ke *citizen control*. Cara untuk mencapai peningkatan keduanya adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam forum-forum warga berbasis spasial yang bertujuan menyelesaikan permasalahan bersama. Partisipasi dalam forum berbasis spasial seperti rapat RT atau temu warga kampung akan meningkatkan pengetahuan warga tentang permasalahan sekitarnya termasuk masalah pembangunan dan Dana Desa, serta menjadi wahana bagi warga untuk meningkatkan kemampuan argumentasinya dalam memperjuangkan kepentingan dalam forum. Hal ini sangat besar artinya bagi peningkatan derajat partisipasi masyarakat dari sekadar tokenisme menuju *citizen control*.

Referensi

Buku

- Bruce, Iain. *The Porto Alegre Alternative: Direct Democracy in Action*. London: Pluto Press. 2004.
- Bunte, Marco. "Indonesia's Protracted Decentralization: Contested Reforms and Their Unintended Consequences" dalam Marco Bunte dan An-

dreus Ufen (ed). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*. New York: Routledge. 2009.

- Burns, Danny, Robin Hambleton, dan Paul Hoggert. *The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy*. London: Macmillan. 1994.
- De Vaus, David. *Research Design in Social Research*. London: SAGE Publication. 2006.
- Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas*. Jakarta: Kementerian Keuangan. 2016.
- Gret, Marion dan Yves Sintomer. *The Porto Alegre Experiment: Learning Lessons for Better Democracy*. London: Zed Books. 2005
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku I*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. 2015.
- Rocke, Anja. *Framing Citizen Participation: Participatory Budgeting in France, Germany and the United Kingdom*. London: Palgrave Macmillan. 2014.
- Satriana, Dan dan Rianingsih Djohani. *Memfasilitasi Konsultasi Publik*. Bandung: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat. 2007
- Wampler, Brian. *Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation, and Accountability*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. 2007

Jurnal

- Souza, Celina, "Participatory Budgeting in Brazilian Cities: Limits and Possibilities in Building Democratic Institutions" dalam *Environment & Urbanization* Vol 13 No. 1, April 2001
- Arnstein, Sherry R, "A Ladder of Participation" dalam *JAIP* Vol. 35 No.4 July 1969

Sumber Elektronik

- Eko, Sutoro "Komunitarianisme Demokrasi Lokal", diakses dari <http://www.ireyogya.org/ire.php?about=komunitarian.htm>, pada tanggal 19 November 2016 pukul 09.38 WIB
- Wampler, Brian "A Guide to Participatory Budgeting", diakses dari <http://www.internationalbudget.org/resources/library/GPB.pdf>, pada tanggal 18 November 2016, pukul 21.34 WIB

TENTANG PENULIS

Ahmad Helmy Fuady

Merupakan peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui email: elhelmy@yahoo.com

Eka Suaib

Menyelesaikan S3 di jurusan Ilmu Politik universitas Airlangga, Surabaya dengan judul disertasi “Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Kompetisi Etnis dalam Politik Lokal Kota Kendari). Saat ini bekerja sebagai Dosen FISIP Universitas Haluoleo, Kendari. Pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua HMI cabang Kendari. Telah menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal, jurnal nasional dan internasional, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu artikel dalam jurnal internasional terbarunya berjudul “Pengaruh Vote Buying terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kota Kendari, dan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan”. Email: ekasuaib1966@gmail.com

Irhamna Irham

Merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamna.irham@gmail.com

Kadek Dwita Apriani

Mahasiswa di Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Penulis dapat di hubungi melalui email: kadek88@gmail.com.

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Penelitian yang menajdi fokus kajiannya adalah gender dan politik, gender dan kebijakan desentralisasi, politik kebijakan

sosial, gender dan perubahan iklim, kajian hak-hak asasi perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, Islam dan Demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gelar MA diperoleh penulis dari *Faculty of Aian Studies* Australian National University (ANU) tahun 2007. Gelar doctor dalam bidang Area Studies Kyoto University Jepang diperolehnya tahun 2012. Disertasi Doktoralnya memenangkan pendanaan dari International Program of Collaborative Research Center of Southeast Asian Studies Kyoto University dan Kyoto University President’s Special Fund, diterbitkan menjadi buku berjudul *Indonesian Woman and Local politics: Islam, Gender and Networks in Post-Soeharto Indonesia* (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015). Email: kurniawati.dewi@yahoo.com

La Husen Zuada

Penulis adalah alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. saat ini menjadi Dosen di FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Penulis juga aktif menulis di harian lokal yang menyangkut isu tentang partai politik, pemilu dan desentralisasi. Sering juga diundang menjadi narasumber diskusi public di tingkat lokal Sulawesi Tenggara tentang Kepemiluan. Email: husenzuadaui@gmail.com

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dan s2 bidang politik di Universitas Indonesia dengan tema tesis masalah perdamaian di Aceh. Peneliti yang pernah ditekuni adalah terkait konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta. Email: hasim_nur@yahoo.com

Nostalgawan Wahyudi

Menamatkan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di International Islamic University Malaysia. Sejak tahun 2014, penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan tergabung dalam tim penelitian Islam dan Demokrasi. Email: wan_jauzy@yahoo.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis menamatkan SI di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2005, dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu-isu ekonomi politik. Email: nyim001@lipi.co.id

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis

diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Email: wiewieqsz@yahoo.com.au

Waode Syifatu

Merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo. Penulis dapat dihubungi melalui email di: waode.syifatu@gmail.com

Yusuf Maulana

Sejak tahun 2015, Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Gelar S1 diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Email: yusufmaulana1987@yahoo.com

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

